

BAB III

AGRESI MILITER BELANDA II

A. Pembagian Tugas dalam Wehrkreise III

Pada saat Agresi Militer Belanda I, Tentara Indonesia menerapkan strategi linier atau pertempuran frontal menghadapi Tentara Belanda. Perlawanan-perlawanan tersebut berkonsep pada pengertian tentang adanya daerah musuh dan daerah RI yang jelas terpisah oleh suatu garis pertempuran yang jelas dan saling tutup-menutup dan sambung-menyambung.¹ Ternyata konsepsi linier ini tidak cocok diterapkan pada TNI yang secara persenjataan kalah jauh dari Tentara Belanda. Dengan mudah pertahanan TNI dapat diterobos dengan pertempuran secara frontal. Belajar dari pengalaman tersebut, maka para petinggi TNI menerapkan konsepsi perang yang berbeda yaitu sistem *wehrkreise*.

Sistem *wehrkreise*, pada dasarnya merupakan sistem pertahanan yang membagi-bagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran (bahasa Jerman, *kreise: lingkaran*) yang dapat mengadakan pertahanan (bahasa Jerman, *wehr: pertahanan*) secara berdiri sendiri.² Semua potensi-potensi yang terdapat dalam lingkaran-lingkaran tersebut diintegrasikan dan dimaksimalkan sepenuhnya untuk mendukung sistem *wehrkreise* ini. Sistem ini kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya pemerintahan militer.

¹Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*, (Jakarta: Virgosari, 1972), hlm. 181.

²*Ibid.*

Sistem *wehrkreise* diterapkan untuk menghadapi kemungkinan pasukan Belanda yang lebih jauh memasuki wilayah RI dan terpecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang menduduki kota-kota besar serta objek vital lainnya.³ Sistem pertahanan *wehrkreise* merupakan perlawanan dengan sistem pertahanan yang mendasarkan pada sistem pertahanan totalitas, yang berarti pertahanan secara keseluruhan yang dilakukan mulai dari pusat komando sampai ke struktur yang terkecil. Dalam perencanaan dan pelaksanaan operasinya, perintah tersebut diberikan secara terpusat dan kemudian penjabaran perintah tersebut dilakukan oleh masing-masing sektor.

Wehrkreise merupakan pusat pertahanan dengan pembagian secara otoritas yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menggunakan bentuk perlawanan gerilya yang dilancarkan secara luas dengan metode penyerangan serbu dan lari (*hit and run*). Di dalam wilayah *wehrkreise* terdapat daerah-daerah basis yang sekaligus sebagai daerah pangkalan gerilya. Pasukan gerilya tersebut disusun dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar, tetapi tiap saat pasukan itu dapat dikonsolidasi dan dikonsentrasikan untuk memberikan perlawanan yang lebih besar.⁴ Perlawanan yang dilakukan berawal dari daerah pangkalan basis gerilya melalui daerah persiapan operasi ke arah pendudukan Belanda yang menjadi sasaran. Selain itu, perlawanan yang dilakukan tidak mengenal waktu operasi karena

³SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 DIY: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, (Jakarta: PT Citra Lamtoro Grup Persada, 1990), hlm. 174.

⁴*Ibid.*, hlm. 175.

perlawanan ini dilakukan secara berlanjut dan bertahap. Sehingga menyebabkan kekuatan Belanda menjadi lemah.

Pada masa Perang Kemerdekaan I, Jenderal Soedirman menggunakan siasat Pertahanan Rakyat Total dan *Wehrkreise*. Tetapi kedua siasat ini tidak dapat dikerjakan secara sempurna. Pelaksanaan WK baru dapat dilaksanakan pada daerah-daerah aman sebagai pencegah masuknya Belanda sampai ke pelosok-pelosok, sebagian besar berupa penggalian parit-parit sebagai perlindungan terhadap bahaya udara. Sedangkan siasat Pertahanan Rakyat Total yang dilaksanakan baru berupa blokade bahan makanan terhadap daerah kedudukan Belanda.⁵ Pasukan *Wehrkreise* III merupakan penjelmaan dari Brigade X TNI dari Divisi III dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Brigade X pada mulanya berasal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Soedarsono. Selanjutnya dalam masa pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada Oktober 1945, menjadi Divisi IX Daerah Istimewa Yogyakarta dan tetap di bawah pimpinan Soedarsono.

Sesuai dengan perubahan TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 26 Januari 1946, maka struktur organisasi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) mengalami perubahan. Struktur TRI untuk Jawa terdiri dari delapan divisi. Daerah Istimewa Yogyakarta dimasukkan dalam Divisi III TRI yang lebih dikenal dengan nama Divisi III/Diponegoro yang meliputi daerah Jawa Tengah dan

⁵Marsudi, "Tentara Pelajar di Jawa Tengah (Dalam Sejarah Revolusi Indonesia 45-51)", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 1970), hlm. 33.

Yogyakarta. Setelah adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) pada 1948 susunan dari jumlah divisi dikurangi dari 8 menjadi 4, berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 tahun 1948.

Dalam sistem pertahanan *wehrkreise* memiliki tiga unsur yang mendukung gerakan perlawanan total, yaitu unsur operatif, unsur territorial, atau pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Pemerintahan militer tersusun dari atas ke bawah. Paling atas yaitu Panglima Besar Angkatan Perang, kemudian Panglima Tentara Teritorium Jawa dan Sumatra, dan tingkat daerah Gubernur Militer (GM). Saat itu daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur terbagi menjadi tiga daerah GM. Daerah GM I Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono, daerah GM II Jawa Tengah bagian Timur (Karesidenan Madiun, Pati, Surakarta, Semarang) dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, dan daerah GM III Jawa Tengah bagian Barat dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng. Pasukan yang berada di Yogyakarta termasuk dalam daerah GM III yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng.

Instansi pemerintahan militer yang termasuk ke dalam GM adalah Sub Teritorium Comando (STC) atau Sub Teritorium Militer (STM) dipimpin residen sipil, Komando Distrik Militer (KDM) dipimpin oleh Bupati Sipil, Komando Onder Distrik Militer (KODM) dipimpin oleh Camat Sipil, Kader Desa, dan juga Kader Dukuh. Peranan yang sangat penting dalam membentuk kantong pertahanan gerilya adalah KODM yang bekerja sama dengan pemerintahan sipil Camat. Hal ini karena secara *de facto* yang benar-benar berfungsi adalah tugas Camat dan Lurah, walaupun

Bupati dan pamongpraja ikut aktif bergerilya.⁶ Pemerintahan militer yang dijalankan mulai teratur dan berjalan menurut rencana.

Panglima Besar Jenderal Soedirman yang memimpin gerilya menuju Jawa Timur tetap memberikan perintah dan komando serta siasat peperangan kepada Panglima Divisi di Jawa dan Sumatera. Pimpinan Panglima Divisi dirangkap oleh para GM dengan pembagian pertahanan *wehrkreise*. Setiap *wehrkreise* dipegang oleh satu Brigade TNI dengan GM sebagai Panglimanya. Susunan WK di Jawa Tengah terbagi menjadi dua GM, yaitu GM timur dan GM barat. GM II Jawa Tengah bagian timur dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto terdiri dari empat kantong WK. Sedangkan GM III Jawa Tengah bagian barat dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng terdiri dari tiga kantong WK.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu termasuk ke dalam wewenang Divisi III, di bawah pimpinan GM Kolonel Bambang Sugeng. Dengan berlakunya pemerintahan militer, maka Brigade X yang bertanggungjawab atas keamanan Yogyakarta berubah menjadi *Wehrkreise* III (WK III) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. WK III dibagi menjadi beberapa Sub *Wehrkreise* (SWK), yaitu:

- a. *Sub Wehrkreise* 101 yang dipimpin oleh Komandan Lettu Marsoedi daerahnya meliputi dalam Kota Yogyakarta.
- b. *Sub Wehrkreise* 102 yang dipimpin oleh Komandan Mayor Sardjono yang meliputi daerah Bantul.

⁶JARAH DAM VII/Diponegoro, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta*, (Semarang: tp, 1983) hlm. 48.

- c. *Sub Wehrkreise* 103A yang dipimpin oleh Komandan Letnan Kolonel Soehoed yang meliputi daerah Bantul Barat, Selatan jalan Yogya-Wates.
- d. *Sub Wehrkreise* 103B yang dipimpin oleh Komandan Mayor Sumual yang meliputi daerah Sleman Barat, Utara jalan Yogya-Wates.
- e. *Sub Wehrkreise* 104 yang dipimpin oleh Komandan Mayor Koesno yang meliputi daerah Sleman.
- f. *Sub Wehrkreise* 105 yang dipimpin oleh Komandan Mayor Soedjono yang meliputi daerah Maguwo dan Wonosari (Gunung Kidul).
- g. *Sub Wehrkreise* 106 yang dipimpin oleh Komandan Letnan Kolonel Soedarto yang meliputi daerah Kulon Progo.⁷

Setiap kantong pertahanan *Wehrkreise* didukung oleh satu Brigade TNI. Daerah WK III didukung oleh Brigade 10 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Sore hari setelah Agresi Militer ke II Belanda, Letnan Kolonel Soeharto meninggalkan kota menuju Desa Ngoto yang ditunjuk sebagai markas sementara. Pada 20 Desember 1948 untuk menghimpun kekuatan militer, Letnan Kolonel Soeharto dengan beberapa stafnya melakukan perjalanan keliling atau konsolidasi. Konsolidasi ini dilaksanakan dalam waktu 5 hari dengan rute Ngoto-Kalibayem-Godean-Cebongan-Cangkringan-Manisrenggo-Prambanan-Piyungan dan kembali ke

⁷Hisbaron Muryantoro, "Peranan Sub Wehrkreise 106 Pada Masa Perang Kemerdekaan II di Kabupaten Kulon Progo Suatu Kajian Sejarah Lisan", *Patrawidya*, Vol. 4, No. 3, September 2003. hlm. 14.

Ngoto. Dapat dikatakan bahwa rute konsolidasi yang dilakukan Letnan Kolonel Soeharto bergerak ke barat hingga Cebongan, kemudian ke utara hingga Manisrenggo, selanjutnya ke selatan hingga Piyungan dan diakhiri kembali ke Ngoto.

Dari perjalanan konsolidasi tersebut diketahui kekuatan yang ada di Yogyakarta kurang lebih 5 batalyon antara lain Pasukan Polisi Militer dengan kekuatan 2 kompi dibawah pimpinan Mayor Sakri di wilayah Imogiri, Pasukan Taruna Militer Akademi dengan kekuatan 2 kompi di bawah Kolonel GPH Djati Kusumo berada di Cangkringan. Batalyon I Sudjono telah sampai di Bantul. Komandan Sub Teritorium Militer Yogya Mayor Selo Ali yang kemudian diganti oleh Letnan Suhud berada di Gamping. Batalyon Hadidjoyo berada di Bantul. Batalyon Basuni berada di daerah Sleman, Batalyon 151 Haryadi (setelah gugur diganti adiknya P.C. Haryo Sudirjo) berada di Sleman Tengah. Brigade XVII/TP dengan kekuatan 1 kompi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto berada di Kulon Progo. Detasemen 3 Brigade XVII di bawah pimpinan Kapten Martono berada di Sleman Tengah dan Brigade XVI (Laskar Seberang) dengan Kepala Staf Kahar Muzakar, Yon Andi Matalata, Yon Palar, Yon Pelloepessy berada di Godean.⁸

Tanggal 26 Desember 1948 dari markas sementara Ngoto, Letnan Kolonel Soeharto memindahkan markasnya ke timur yaitu Desa Segoroyoso. Selanjutnya Desa Segoroyoso ditetapkan sebagai Markas Komando *Wehrkreise* III yang menempati rumah keluarga Gardo Utomo dan segera dilengkapi dengan peralatan administrasi, Pos PMI, Dapur Umum dan sarana lainnya. Dengan ditetapkannya

⁸*Ibid.*

markas di Segoroyoso, maka disusun staf Komando Gerilya WK III, Staf A Komando Pasif dipimpin oleh Mayor Reksosiswo (Kepala Staf Brigade 10) yang kemudian dipindah ke daerah Pandak. Staf B Komando Aktif dan bergerak mobil, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto sendiri dan bertempat di Segoroyoso.⁹

Komando Tentara Pelajar maupun Brigade XVII tersebar dalam berbagai *Sub Wehrkreise* (SWK) di Yogyakarta. Daerah Sleman Utara yang termasuk dalam SWK 104 merupakan basis pertahanan Yogyakarta bagian utara dalam menghambat pasukan musuh yang berasal dari Magelang maupun Semarang. Daerah ini semula diserahkan kepada TNI Batalyon 151 dengan Komandan Kapten Maryadi. Pada suatu pertempuran melawan Belanda, pasukan TNI Batalyon 151 tidak dapat bertahan terhadap serangan musuh sehingga menyebabkan Kapten Maryadi dan pasukannya banyak yang gugur. Selanjutnya, pertahanan daerah SWK 104 diserahkan kepada pasukan Tentara Pelajar dengan Komandan Detasemen III Martono. Pasukan Tentara Pelajar di daerah ini mendapat kode pasukan "O".¹⁰ Pasukan TP ini bertugas untuk menjaga keamanan dan pengacauan terhadap kedudukan Belanda.

Daerah Kulon Progo termasuk dalam SWK 106 dengan Komandan Letnan Kolonel Soedarto. Daerah SWK 106 ini merupakan pusat daerah komando perjuangan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II. Letnan Kolonel Soedarto sendiri merupakan Komandan Pasukan Brigade XVII. Pada dasarnya Pasukan

⁹SESKOAD, *op.cit.*, hlm. 132.

¹⁰Sewan Susanto, *Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 74.

Brigade XVII merupakan gabungan antara TGP, TRIP, TP, dan CM.¹¹ Pasukan Brigade XVII telah merencanakan daerah Kenteng sebagai pangkalan pertahanan atau pengunduran apabila Yogyakarta diserang Belanda. Tugas Brigade XVII yaitu menangani masalah yang berkaitan dengan pekerjaan pos atau kurir dan komandan perhubungan secara bertahap berusaha menyempurnakan rangkaian pos tersebut.

B. Operasi Kraai dan Penyerangan Maguwo

Berbagai usaha perundingan antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) menemui jalan buntu. Berbagai cara pihak Belanda untuk memacetkan perundingan merupakan isyarat yang jelas supaya pihak Indonesia tetap waspada terhadap manuver politik Belanda.¹² Setiap manuver politik Belanda untuk menghambat perundingan dengan Indonesia semakin gencar dilakukan menjelang akhir tahun 1948. Bahkan dengan itikad baik Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik lewat perundingan terus diupayakan antara lain dengan prakarsa Perdana Menteri Muhammad Hatta pada 27 November 1948 diadakan perundingan yang berlangsung di Kaliurang. Namun perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan karena perselisihan mengenai prinsip.

Pada tanggal 11 Desember 1948, pemerintah Belanda mengirim nota kepada KTN yang intinya menyatakan bahwa Republik Indonesia (RI) terbukti tidak mempunyai kekuasaan yang nyata atas pasukan tentara, sehingga genjatan senjata

¹¹Dharmono Hardjowidjono, *op,cit.*, hlm. 295.

¹²Tjokropranolo, *Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Surya Perindo, 1992), hlm. 120.

tidak dapat terjamin kelangsungannya. Belanda harus bertindak melaksanakan pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal. Sebagai penutup nota tersebut, pemerintah Belanda menyatakan bahwa perundingan di bawah pengawasan KTN tidak ada gunanya lagi, karena pemerintah RI dianggap tidak mau mengakui gendat senjata dan Persetujuan Renville.

Pada tanggal 17 Desember 1948, Belanda kembali mengeluarkan ultimatum melalui KTN yang meminta RI mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda dan ikut serta dalam pemerintah yang dirancang oleh Belanda. Jawaban balasan dari pemerintah RI harus sudah diterima pihak Belanda pada tanggal 18 Desember 1948 jam 10 pagi. Tetapi jawaban Pemerintah RI di Yogyakarta tidak dapat segera dirumuskan dan disampaikan mengingat batas waktu yang singkat. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 pihak Belanda menyatakan kepada KTN, bahwa pihaknya mulai 19 Desember 1948 pukul 10.00 waktu Jakarta tidak lagi merasa terikat oleh persetujuan Renville.¹³ Surat senada juga dialamatkan ke Sekertariat Delegasi Indonesia di Jakarta pada 18 Desember 1948 pukul 23.45. Berita ini kemudian diteruskan kepada pemerintah RI di Yogyakarta, namun gagal karena saluran telekomunikasi telah terputus. Hal tersebut memang salah satu rencana Belanda agar rencana mereka berhasil. Rencana Agresi Militer Belanda II telah diputuskan pada sidang kabinet Belanda di Den Haag, dan agresi akan dilancarkan

¹³Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya*, (Semarang: CV. Borobudur Megah, 1977), hlm. 310.

tanggal 20 Desember 1948.¹⁴ Akan tetapi, pihak Pemerintah Belanda mendengar berita bahwa Presiden Soekarno akan berangkat ke India pada 19 Desember 1948, sehingga Kabinet Belanda mengadakan sidang darurat dan memutuskan serangan ke Yogyakarta dimajukan menjadi 19 Desember 1948 untuk mencegah Presiden Soekarno lolos ke luar negeri.

Jenderal Spoor sebagai Panglima Tentara Belanda mendukung putusan Pemerintah Belanda untuk segera melancarkan agresi militernya. Rencana agresi militer Belanda telah dipersiapkan secara matang oleh Jenderal Spoor. Rencana tersebut akan memfokuskan untuk menguasai pusat pemerintahan RI di Kota Yogyakarta. Operasi ini akan dilaksanakan dengan sandi *Operatie Kraai*. Syarat utama keberhasilan Operasi Kraai ini adalah kecepatan mobilisasi dan sebanyak mungkin menangkap pegawai pemerintahan RI. Yogyakarta dijadikan sasaran Operasi Kraai karena menjadi pusat pemerintahan RI dan menjadi Ibukota Indonesia.

Operasi Kraai telah direncanakan oleh Staf Umum Belanda sejak Januari 1948 dan terus dikaji ulang agar kesiapan angkatan tempurnya dapat meningkat secara optimal. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah pasukan di Jawa dan Sumatra harus dalam kekuatan maksimal. Di Jawa tersedia 33 batalyon tempur infanteri dan 18 batalyon pengawal (37 KL, 12 KNIL, dan 2 batalyon mariner). Kekuatan tersebut mencakup 3 batalyon OVW (sukarelawan perang) dan Divisi C “7 Desember” yang ditunda demobilisasinya karena pemberontakan PKI. Brigade F sebagai pasukan

¹⁴Pamoe Rahardjo, *Gerilya dan Diplomasi: Operasi Hayam Wuruk Sebuah Epik dalam Revolusi*, (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1996), hlm. 244.

tambahan yang baru tiba dari Eropa. Sedangkan di Sumatera tersedia 12 batalyon tempur, 5 batalyon pengawal (14 KL dan 3 KNIL) dengan kekuatan 121.500 orang. Sebagai cadangan umum adalah kesatuan KST (*Korp Speciale Troepen*), termasuk kompi Para 1 yang baru selesai dibentuk. Kekuatan darat itu dapat mengharapkan bantuan 6 skuadron tempur, pembom, dan transport, beberapa pesawat pengintai, dan kapal-kapal artileri serta kapal-kapal pendarat Angkatan Laut.¹⁵

Dalam rencana Operasi *Kraai*, pendudukan wilayah RI bukan lagi sasaran utama, tetapi sasaran kedua untuk menyingkapkan pemerintah RI dan menghancurkan Angkatan Perangnya. Pasukan-pasukan penyerang akan disusun dalam kelompok bertempur yang mobil, yang dalam operasi tahap pertama harus dapat menghancurkan pemerintah RI, Angkatan Perang, markas-markas tentara, dan beberapa daerah kunci. Pasukan tempur dengan mobilitas dan daya tembak tinggi tidak hanya untuk menghancurkan markas militer dan merebut daerah kunci, tetapi juga mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi militer TNI.

Tugas untuk melancarkan serangan itu diberikan kepada Kolone Tempur A yang dipimpin Kolonel van Langen, Komandan Brigade T "*Tiger Brigade*" Divisi B. Kolonel van Langen akan menggerakkan 3 batalyon organiknya, Batalyon 1 Resimen Infanteri 15 (1-15 RI), Batalyon 5 *Resimen Stoottroepen* (5 RS), dan diperkuat dengan satuan artileri, kavaleri, dan zeni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kolonel van Langen diperbantukan oleh satuan tugas Grup Tempur M

¹⁵Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor (Operatie Kraai) VS Jenderal Soedirman (Perintah Siasat No. 1)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 238.

(*Gevechtsgroep M*) yang terdiri atas 2 Kompi Para 1 Batalyon KST KNIL. Bantuan tembakan dan pengangkutan udara diberikan oleh satuan udara *Militaire Luchtvaart* KNIL (Kesatuan Udara KNIL), yang terdiri atas Skuadron 18 dengan pesawat pembom B25 (Mitchell), Skuadron 121 dan 120 dengan pesawat tempur P51 (Mustang), P40 (Kittyhawks), dan Skuadron 20 dengan pesawat angkut C47 (Dakota).¹⁶

Operasi penyerbuan Yogyakarta dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, dilancarkan operasi penyerbuan udara (*air assault*) dengan menerjunkan pasukan Para untuk merebut lapangan terbang Maguwo. Kemudian pasukan tersebut bertugas membentuk dan mengembangkan tumpuan udara dan pangkalan untuk pesawat-pesawat tempur. Tahap operasi kedua, operasi pendaratan udara (*airlanding operation*) oleh sisa Grup Tempur M, dengan tugas memperkuat penguasaan lapangan terbang dan mengonsentrasikan kekuatan tempur sebelum melanjutkan serangan untuk merebut sasaran utama. Tahap operasi selanjutnya, penggabungan Brigade T yang bergerak bermotor dari Salatiga-Kartasura-Klaten dengan Grup Tempur M, yang selanjutnya bertugas menduduki dan menguasai Yogyakarta setelah sasaran utama direbut.

Pada 19 Desember 1948 pukul 04.00, di lapangan terbang Andir, Bandung, Jenderal Spoor dan Mayjen Engles sebagai Komandan Divisi C “7 December” berada di tengah pasukan Grup Tempur Para 1 (*Ge-vechtsgroep Para 1*) untuk melakukan pemeriksaan dan persiapan. Grup Tempur Para 1 merupakan bagian dari Grup

¹⁶*Ibid.*, hlm. 259.

Tempur M, yang terdiri atas dua kompi, satuan elite Para dan Para Komando KST (*Korps Speciale Troepen*), pasukan baret merah dan hijau. Pasukan-pasukan Para itu dengan segala perlengkapan tempurnya sedang embarkasi di atas pesawat angkut Dakota C47-A. Di bawah komando Kapten Eekhout, pasukan elite itu bertugas memelopori serangan udara untuk merebut lapangan terbang Maguwo.

Pada pukul 06.00, armada pesawat C47 yang mengangkut Grup Para 1 telah sampai di titik *rendezvous* di kapal korvet Angkatan Laut Belanda, *Hr. Ms. Torenvalk*, yang berada laut selatan Yogyakarta. Pada saat itu juga, dimulailah penembakan dan pemboman udara terhadap lapangan terbang Maguwo dan sekitarnya oleh 5 pesawat tempur F51 *Mustang* dan 9 pesawat tempur P40 *Kittyhawks*. Bangunan-bangunan penting di lapangan Udara Maguwo seperti kompleks-kompleks tentara untuk menghentikan kegiatan TNI di bom dan ditembaki dengan senapan mesin. Selanjutnya pesawat C47 meninggalkan kapal korvet dan menuju lapangan terbang Maguwo di mana pasukan Para akan diterjukan di DZ (*Dropping Zone*) 1 dan DZ 2 yang berada di kanan dan kiri lapangan terbang. Penerjunan dimulai dengan perlindungan pesawat-pesawat tempur.

Pasukan Belanda menggunakan taktik pengalihan perhatian kepada pasukan pertahanan lapangan terbang Maguwo. Mereka menggunakan boneka terjun payung untuk mengelabui pasukan pertahanan lapangan terbang Maguwo. Hal tersebut semakin memudahkan pasukan Para untuk terjun menyergap pasukan pertahanan lapangan terbang. Setelah kedua kompi pasukan Para berhasil mencapai DZ, mereka bergerak untuk memperluas tumpuan udara dan menyerang pasukan yang

mempertahankan pangkalan udara Maguwo. Dalam pertempuran yang tidak seimbang tersebut, Kadet Udara Kasmiran, Sersan Mayor Udara Tanumihardjo, Kopral Udara Tohir, dan 30 prajurit lainnya gugur.¹⁷

Lapangan udara Maguwo akhirnya berhasil dikuasai Belanda setelah berhasil melumpuhkan pertahanan pasukan Indonesia yang berada di Maguwo. Kompi-kompi penyerbu telah menyusun pertahanan, mengadakan konsolidasi, dan menutup jalan besar Yogyakarta-Klaten. Kapten Penerbang Cox, yang ikut terjun dengan pasukan Para, melaporkan bahwa seluruh landasan terbang telah selesai diperiksa dan dibersihkan dari ranjau, bahan peledak, dan lainnya yang belum dipasang oleh pasukan pertahanan lapangan terbang Maguwo. Selanjutnya, Pasukan Belanda mengabarkan kepada pesawat yang mengangkut Grup Tempur M di Semarang, bahwa lapangan terbang Maguwo telah siap untuk dipakai. Kolonel van Langen langsung mengambil alih komando dari Kapten Eekhout serta memimpin operasi selanjutnya. Batalyon KST dan Batalyon Resimen Infanteri 15 telah siap melanjutkan tugas untuk menyerang sasaran utama. Keseluruhan gerakan dilindungi dan dibantu oleh pesawat tempur *Mustang* dan *Kittyhawk*. Hal ini bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik dari TNI yang masih berada di sekitar landasan terbang.

Dikarenakan seluruh Brigade T tidak dapat diangkut melalui udara, sehingga sisa brigade bergerak melalui darat dari pangkalannya di Salatiga menuju Yogyakarta. Pasukan tersebut disusun dalam Kolone Tempur 1, terdiri atas satu Batalyon Infanteri (5-5 RI), dua Batalyon Artileri Medan (2-12 RVA dan 2-2 RVA),

¹⁷SESKOAD, *op.cit.*, hlm. 88.

satu Kompi ¹⁸Tank 7 (7 Vew), satu Kompi Panser 2 (2 Paw), dan satu Kompi Zeni Lapangan 5 (5 Gi-Vd), yang bergerak dibawah pimpinan Wakil Komandan Brigade T. Kendaraan-kendaraannya ditulisi dengan kata-kata “*Naar Djokdja*” (Ke Yogya), dan “*De Soldaten van Spoor, komen er overall door*” (Prajurit-prajurit Spoor, dapat mendobrak ke mana-mana). Keseluruhan gerak serangan Belanda untuk merebut Maguwo dipantau oleh Jenderal Spoor dari pos komando udaranya.

Setelah pasukan Belanda berhasil menduduki lapangan Terbang Maguwo, pasukan Belanda Brigade T di bawah pimpinan Kolonel van Langen bergerak menuju Kota Yogyakarta melalui dua poros. Sayap kiri melalui Gedong Kuning, Semaki, dan Sentul. Sayap kanan terdiri dari tiga kolone, kolone pertama satu kompi bergerak melalui Demangan menyusur ke utara jalan raya, kolone kedua dengan dua kompi menyusur jalan raya dan kolone tiga sebanyak dua peleton menyusuri rel kereta api. Tujuan kedua pasukan tersebut sama, yaitu mengepung Kota Yogyakarta dari timur menuju Gedung Agung.

C. Upaya Mempertahankan Kota Yogyakarta

Serangan Belanda terhadap Yogyakarta sebenarnya sudah diprediksi akan terjadi, namun kapan tepatnya tidak dapat dipastikan. Nasution mengungkapkan bahwa serangan dadakan yang dilakukan Belanda terhadap Yogyakarta disebabkan oleh perkembangan diplomasi. Hal itu ialah kebuntuan perundingan-perundingan yang dilakukan, dan tidak adanya laporan-laporan intelijen baik dari jawatan Intelijen

¹⁸Himawan Soetanto, *op,cit.*, hlm. 285.

Kementrian Pertahanan maupun bagian I Markas Besar.¹⁹ Pokok permasalahan terletak pada tidak disetujuinya tuntutan Belanda terhadap Republik Indonesia untuk membubarkan TNI dan menerima KNIL sebagai Inti angkatan Perang Negara Indonesia Serikat. Masalah keberadaan TNI akhirnya menjadi tujuan utama Belanda menyerang Yogyakarta. Tujuan mereka adalah meniadakan para pemimpin negara dan TNI. Hal itu dilakukan karena Belanda menganggap Republik adalah modal pokok perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu apabila Yogyakarta yang berkedudukan sebagai pusat pemerintah Indonesia telah direbut dan diduduki, maka secara praktis kekuatan utama pertahanan Republik Indonesia, TNI akan mengalami kekalahan.

Tanggal 19 Desember 1948 sekitar pukul 05.15 terdengar suara pesawat terbang Belanda di atas Lapangan Terbang Maguwo. Rakyat Yogyakarta mengira bahwa pesawat terbang tersebut adalah milik RI yang mengadakan latihan perang sesuai pengumuman Jenderal Sudirman kemarin. Gemuruh suara pesawat-pesawat tersebut semula tidak menimbulkan kepanikan penduduk, karena menyangka bunyi itu adalah pesawat-pesawat terbang AURI yang mengadakan latihan perang. Rakyat Yogyakarta tidak menduga bahwa pesawat-pesawat itu bukan pesawat bekas Jepang yang dimiliki AURI. Ada pula yang mengira, bunyi pesawat tersebut adalah pesawat dari India, yang akan menjemput Presiden Soekarno yang pada hari itu direncanakan akan bertolak ke India untuk kunjungan kenegaraan. Tembakan dari udara semakin

¹⁹Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Rute Perjuangan Gerilya Pangsar Jenderal Sudirman*. (Bandung: CV. Jasa Grafika Indonesia, 2010), hlm. 15.

gencar dilakukan oleh pesawat-pesawat Belanda. Korban mulai berjatuhan dan diangkat, sehingga masyarakat Yogyakarta mulai menyadari dengan penuh kecemasan bahwa Belanda mulai menyerang secara besar-besaran.

TNI berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat laju pasukan Belanda yang memasuki ke dalam kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan pada pasukan yang berada di dalam kota untuk mempersiapkan diri melaksanakan bumi hangus, pengamanan amunisi, logistik dan pengunduran diri ke kota, sesuai yang direncanakan pada Perintah Siasat No. 1 Panglima Besar APRI.²⁰ Untuk menghambat laju Pasukan Belanda, Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto dengan dia seksi staf Brigade menghadang Pasukan belanda di sebelah timur Kota Yogyakarta yang diperkuat oleh dua seksi Taruna Militer Akademi.²¹

Pasukan Peleton Marjuki menghadang Pasukan Belanda disepanjang jalan Yogya-Solo. Peleton Dimiyati bergerak ke Lempuyangan menghadang disepanjang jalur rel kereta api. Seksi Mobrig Polisi DKN (Djawatan Kepolisian Negara) di bawah pimpinan Johan Suparno menghadang di Janti dan Gedong Kuning. Sedangkan Pasukan TNI yang menghadang gerak Pasukan Belanda dari sayap kiri di Kampung Nyutran terlibat pertempuran yang tidak seimbang, akhirnya mengundurkan diri ke arah selatan.

Sesudah melakukan aksi-aksi penghambatan yang memang telah diperhitungkan, tidak akan mampu menghancurkan kekuatan lawan, pasukan-pasukan

²⁰Lihat lampiran No 9, hlm. 111.

²¹Hisbaron Muryantoro, *op,cit.*, hlm. 8.

TNI mengundurkan diri ke luar kota untuk berkonsolidasi. Kadet MA dan kesatuan CPM mengundurkan diri dari Semaki ke bagian tenggara Yogya dan sebagian ke Wiyoro serta Kotagede. Johan Suparno beserta kesatuannya dari Mobile Brigade mundur ke Gamping, sedangkan unsur bantuan logistik mundur ke Rewulu dan Godean. Dalam kesatuan yang mundur ke Gamping ini terdapat Kepala Polisi Yogyakarta dan Stafnya Inspektur Satu Koeswandi dan Seno Kertonegoro.

Pasukan-pasukan dari Brigade 16 mengundurkan diri ke barat dan bermarkas di Godean.²² Dari arah barat, terdapat pasukan ALRI CA II (Angkatan Laut Republik Indonesia Corps Armada II) Cilacap dalam usaha menghambat gerak maju Pasukan Belanda. Yang dilakukan oleh Regu Sabotase pimpinan Kapten Sudardjo dengan cara meledakan jembatan-jembatan disepanjang jalan raya menuju Kota Yogyakarta, membumihanguskan beberapa gedung yang mempunyai arti taktis bagi musuh, membuat rintangan dengan merobohkan pohon dan melakukan penghadangan Konvoi Belanda. Sementara itu, Presiden Soekarno segera memanggil menteri-menterinya untuk segera mengadakan sidang kabinet dalam keadaan genting. Bung Hatta sedang bermalam di Kaliurang karena sedang tidak enak badan. Kemudian Sri Sultan HB IX yang menjabat sebagai Menteri Negara setelah mengetahui adanya serangan Belanda segera menemui Presiden Soekarno di Istana Negara (Gedung Agung). Karena wakil presiden masih berada di Kaliurang, maka Sri Sultan HB IX segera meminta izin untuk menjemputnya.

²²Piere Heijboer, *Agresi Militer Belanda; Memperebutkan Rending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949*, (Jakarta: Gramedia KITLV, 1999), hlm. 3-15.

Setelah Wakil Presiden berhasil dijemput dengan perjalanan yang menegangkan, sidang darurat dilaksanakan di istana presiden yang juga dihadiri oleh beberapa pembesar TNI. Sidang kabinet tersebut menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah RI tidak akan meninggalkan kota Yogyakarta dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta untuk mempermudah hubungan dengan pihak KTN di Kaliurang. Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra, disertai membentuk dan memimpin Kabinet Darurat, atau kalau perlu membentuk Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri dengan memberi mandat kepada Mr. Maramis (Menteri Keuangan) yang sedang berada di India jika presiden dan wakil presiden tertangkap Belanda.²³

Setelah sidang selesai oleh Sekretaris Negara keputusan pemerintah yang berisi mandate tersebut disebarkan kepada para wartawan dan berhasil disebarkan melalui berita ANTARA ke seluruh dunia. Disamping pengumuman tersebut, disiarkan pula seruan pemerintah agar para anggota delegasi atau pembesar pemerintah tidak mengadakan perundingan sendiri-sendiri dengan pihak Belanda. Perundingan dengan pihak Belanda atau pihak manapun juga hanya bisa dilakukan jika para pemimpin RI (yang ditawan) dapat berkumpul satu sama lain serta bebas dari suatu tekanan. Dalam pengumuman ini, pemerintah menyatakan bahwa mulai tanggal 19 Desember 1948 Pemerintah Pusat di Jawa tidak berkuasa lagi dan kekuasaan dipindahkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

²³A.Eryono, *op.cit.*, hlm. 87.

Ketika Jenderal Soedirman mengetahui bahwa Belanda telah mulai dengan Agresi Militer Belanda II, beliau menyuruh Kapten Suparjo menghadap Presiden untuk meminta instruksi lebih lanjut. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak kembali, maka Jenderal Soedirman menyusul ke Istana dan diterima oleh Presiden. Atas saran Presiden, Jenderal Soedirman dianjurkan agar tetap di dalam kota saja karena sedang sakit. Mendengar anjuran tersebut, Jenderal Soedirman tidak mau, karena menurut pendapatnya ia harus bersama ditengah prajuritnya semua. Ia akan memimpin gerilya sesuai dengan rencana yang telah disusun jauh sebelumnya apabila ada serangan Belanda. Jenderal Soedirman kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan nama Perintah Kilat No. 1/PB/D/1948. Sedangkan Nasution menerapkan perberlakuan pemerintahan militer di seluruh Jawa.²⁴

Dengan masuknya Tentara Belanda ke Yogyakarta, pasukan TP yang telah bersiap di berbagai asrama untuk mengadakan latihan perang, segera mengundurkan diri ke luar kota, karena diperkirakan tidak akan mampu menghadapi Tentara Belanda. Serangan Belanda yang mendadak tidak memberikan kesempatan untuk segera menyusun perlawanan, sehingga gerakan ke luar kota dapat dikatakan tidak menurut komando lagi. Masing-masing pasukan pejuang yang mengundurkan diri membentuk kesatuan konsolidasi sendiri-sendiri.

Seluruh pasukan TP yang berada di Staf Kwartier Brigade XVII segera berangkat ke barat menuju Kapanewon Kenteng dengan pimpinan Suryadi dan

²⁴Lihat lampiran No. 10, hlm. 113.

Toro.²⁵ Mereka berhasil membawa perlengkapan persenjataan ke luar kota dengan menggunakan gerobak. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1948, sebagian pasukan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pegunungan Menoreh.²⁶ Pasukan TP lainnya di Gerjen mengundurkan diri ke selatan di bawah pimpinan Marsono. Pasukan yang semula dipimpin oleh Karyono tinggal di asrama Pingit mulai mengundurkan diri ke barat. Satu seksi pasukan TP lainnya mengundurkan diri ke Sleman di bawah pimpinan Darsono dan wakilnya Mustapa Supangat.

Pasukan TP pimpinan Suratno yang bergerak ke selatan kota tersusul oleh pasukan Belanda di Dongkelan sehingga terjadi pertempuran yang menyebabkan seorang anggota TP tertembak. Pasukan TP yang berada di Brosot di bawah Muhtar Room, dan ada pula pasukan TP yang tetap tinggal di kota di bawah pimpinan Ismanji dan Wakilnya Anwar Rasyid. Pasukan yang berada di kota kemudian membentuk pasukan rahasia dengan nama Penggempur Dalam atau sering disebut *Pendem*, maksudnya yang bergerak di bawah tanah.²⁷

Pasukan TP Yogyakarta yang tercerai-berai tidak pada satu komando menyebabkan beberapa anggota TP terlepas dari induk pasukannya. Mereka kemudian menggabungkan diri pada pasukan lain yang dijumpai ketika ke luar kota. Sehingga terdapat anggota yang terus mengikuti pasukan lain tersebut, bahkan hingga PK II berakhir.

²⁵Lihat lampiran No. 13, hlm. 120.

²⁶*Gerilya Wehrkreise III*, (Yogyakarta: Percetakan Keluarga, tt), hlm. 42-43.

²⁷Marsudi, *op.cit.*, hlm. 58.